

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aperldoorn, Van. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- C., Anwar. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Mutiara.
- Kuncoro, Mudrajad dkk.. 2007. *Transformasi Pertamina: Menuju Perusahaan Minyak dan Gas Kelas Dunia*, Yogyakarta: FEB UGM.
- Lubis, T. Mulya dan Richard M. Buxbaum. 1986. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- MD, Moh. Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchsan. 2007. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pradnyana, Gde. 2014. *Nasionalisme Migas*, Banten: Nayottama Press Holdings.
- Pudyantoro, A. Rinto. 2012. *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: Petromindo.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: NUANSA.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Sangadji, Eta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sasono, Didik. 2007. *Aspek Hukum Administrasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia*, Surabaya: PT. Wisnu Inter Sains Hakiki.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- S., Salim H.. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syeirazi, M. Kholid. 2009. *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Tambunan, A. S. S.. 2001. *UUD 1945 Sudah Melihat Jauh Ke Depan*, Jakarta: Puporis Publisher.

Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bhagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Wheare, K.C.. 2011. *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Bandung: Nusa Media.

## **B. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

ST Paul, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, Jakarta.

## **C. Jurnal**

Magnar, Kuntana, Inna Junaenah dan Giri Ahmad Taufik. 2010. *Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20/2002*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

Mujiburohman, Dian Aries. 2013. *Akibat Hukum Pembubaran BP Migas*, Mimbar Hukum STPN Yogyakarta Volume 25, Nomor 3.

#### **D. Publikasi**

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, PT. Pertamina (Persero), dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, 2016, *Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara Pada PT Pertamina (Persero)*.

SKK Migas, 2014, *Laporan Tahunan SKK Migas 2014*.

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional, 2015, *Rekomendasi Akhir Memperkokoh Kelembagaan Sektor Migas Indonesia*.

#### **E. Seminar**

Majid, Akmal Irfan. 2016. *Peran Teknologi dan Infrastruktur Migas-EBT Dalam Mendukung Ketahanan Energi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, disampaikan dalam “*Monthly Knowledge Sharing: Kedaulatan Energi Indonesia*”, diadakan oleh *Gadjah Mada Oil and Gas Club*, Yogyakarta, 26 Maret 2016.

Yuniza, Mailinda Eka. 2014. *Pengaturan Tata Kelola Gas Bumi dalam UU Migas dan Kesesuaiannya dengan Konstitusi*, disampaikan dalam “*Seminar Nasional Tata Kelola Niaga Gas Bumi Menuju Kedaulatan Energi: Tinjauan Aspek Industri, Aspek Hukum, dan Aspek Ekonomi*”, diadakan oleh Pusat Studi Energi UGM, Yogyakarta, 25 Agustus 2014.

#### **F. Penelitian Lain**

Andrew Steven Raymond Tumbelaka, 2013, *Tinjauan Yurid Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi sebagai Pengganti BP Migas Pasca Dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya*

*Mineral Nomor 3135 Tahun 2012*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Rinayuhani, Tri Ratna. 2009. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Liberalisasi Sektor Migas (Studi Kasus Proses Terbentuknya UU Migas No. 22 Tahun 2001)*, Tesis pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada.

Samosir, Jefri Daniel. 2014, *Tinjauan Yuridis Perubahan Pengaturan Peran dan Fungsi Badan Khusus Pengelola Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Menurut Ketentuan Hukum Tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

## **F. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*The Petroleum Tax Code 1997.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 44 PrP Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 64).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1994).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pusat Studi Energi UGM, 2016, Draft RUU Migas (Naskah Aspirasi UGM), Yogyakarta.

#### G. Website

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [www.perpustakaan.bphn.go.id](http://www.perpustakaan.bphn.go.id), diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 14.53 WIB.

Batubara, Marwan. *Agregator dan Kelembagaan Gas*, [www.perpustakaan.bappenas.go.id](http://www.perpustakaan.bappenas.go.id), diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 16.08 WIB.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN SETJEN DPR-RI, *Penerimaan Migas dalam RAPBN 2014*, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 pukul 13.40 WIB.

Palupi, Wulan Tunjung. *Perjalanan Berkelok: Kelola Migas dan Tambang*, <http://ftp.unpad.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Juni 2016 pukul 18.44 WIB.